

BAB II

EKSISTENSI PARTAI KEADILAN SOSIAL PADA KANCAH POLITIK DI INDONESIA

Bab ini akan membahas mengenai Partai Keadilan Sosial (PKS). Dalam mengupas hal tersebut, akan dijelaskan bagaimana landasan secara historis terbentuknya PKS berturut dengan perkembangan dan persaingannya di kancah perpolitikan Indonesia. Bab ini juga akan menguliti ideologi dari PKS serta kontroversi-kontroversi yang pernah atau sedang berkembang di PKS.

2.1 Sejarah Keterlibatan Politik Partai Keadilan Sejahtera

Kehadiran PKS di arena politik Indonesia bermula dari gerakan keagamaan Jemaah Tarbiyah yang berpengaruh di kampus-kampus selama tahun 1980-an dan 1990-an. Adapun kemunculan Jemaah Tarbiyah di Indonesia bukanlah fenomena tersendiri, melainkan bagian dari proses Islamisasi secara umum. Sebagai bagian integral dari agenda Islamisasi di Indonesia, Jemaah Tarbiyah telah mencurahkan energinya untuk dua macam reformasi: memupuk mereka yang “sudah muslim” dan mereformasi sistem struktur politik formal sesuai ajaran Islam (Machmudi, 2008:51).

Aktivis Jemaah Tarbiyah kemudian mendirikan Partai Keadilan (PK) pada 20 Juli 1998, dengan Nurmahmudi Ismail sebagai presiden pertamanya. Partai ini resmi didirikan dua bulan setelah lengsernya rezim Soeharto pada 21 Mei 1998. Kejatuhan

Soeharto sebagai pertanda era Reformasi menjadi titik balik bagi ideologi Islam di kancah politik untuk memperbesar sayapnya di Indonesia. Hal yang sulit terjadi pada rezim Soeharto akibat adanya marginalisasi Islam politik dalam lebih dari tiga dekade kepemimpinannya.

Sebelumnya, setelah Soeharto melarang Partai Komunis Indonesia (PKI), politik Islam sebagai salah satu sumber potensial oposisi terhadap Soeharto, turut dengan cepat terpinggirkan (Hadiz, 2011:18). Peminggiran ini antara lain mewajibkan kelompok Islam untuk menyesuaikan diri dengan falsafah negara, membatasi penggunaan simbol dan bahasa Islam, serta membatasi jumlah partai Islam. Pada tahun 1973, semua partai Islam dipaksa untuk bergabung dan membentuk PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Nama partai itu sendiri menunjukkan marginalisasi Islam politik di bawah dekade pertama Orde Baru dengan menghilangkan referensi dan representasi langsung yang merujuk pada Islam (Heiduk, 2012:30).

Jatuhnya Orde Baru dan bangkitnya aktivisme Islam politik di Indonesia terlihat dari setidaknya 42 partai bernuansa Islam dari 141 partai politik baru yang lahir setelah kejatuhan rezim Soeharto. Meski demikian, hanya 24 partai Islam dari 42 partai tersebut yang lolos seleksi pada pemilu 1999, termasuk PK yang kemudian kalah pada pemilu 1999 dengan kegagalan menembus dua persen ambang batas pemilihan. Saat itu, terdapat 18 partai politik dari total 48 kontestan partai di pemilu yang mendapatkan kursi di parlemen dengan 5 partai besar dengan hasil suara terbanyak yang tiga di antaranya merupakan partai Islam, yakni PKB di urutan ke-tiga, PPP di urutan ke-

empat, dan PAN di peringkat lima. Sementara dua teratas dipegang oleh partai Nasionalis dengan ideologi Pancasila yakni PDI-P dan Golkar.

Terlepas dari banyaknya partai yang bertarung dalam pemilu 1999, partai terbagi sebagai bagian dari salah satu dari tiga kategori utama: sekularis (atau nasionalis sekuler), Islam tradisional, dan Islam modernis (Sherlock, 2004:18). Nasionalisme sekuler umumnya dilihat sebagai pengartikulasian aspirasi dan lingkungan yang membentuk mayoritas penduduk Indonesia bersamaan dengan agama minoritas seperti Kristen, Hindu, dan Buddha. Kelompok ini kemudian disebut sebagai kelompok atau kaum Abangan yang identik sebagai golongan bawah, terutama pekerja, petani kecil, dan buruh pedesaan (Ufen, 2008:10). Sementara Islam Tradisionalis adalah salah satu afiliasi yang sering diidentifikasi sebagai golongan Santri yang dalam tataran kelas, secara sosial dianggap dekat dengan Abangan (Burhani, 2017: 331). Islam modernis adalah afiliasi lain dari kaum santri dan dibedakan dari bentuk-bentuk tradisional oleh kemurnian doktrinal dan kitab suci yang lebih besar serta penolakan terhadap praktik-praktik rakyat yang dipengaruhi Hindu-Jawa yang mencirikan Islam sinkretis tradisional. Organisasi Islam modernis secara historis berbasis di sekitar profesional perkotaan dan bisnis kelas menengah dan pedagang pedesaan (Burhani, 2017: 332). Istilah-istilah ini dikelompokkan oleh Geertz (1960) sebagai tiga kelompok yang memiliki pengaruh dalam skena politik di jantung Jawa yang menjadi arena strategis perpolitikan Indonesia.

Dari tiga kelompok tersebut, partai-partai sekularis sejak era Orde Lama sudah menjelma menjadi partai-partai terkuat. Sherlock (2004: 18) melihat PDI-P sebagai bukti nyata. Partai ini menyatakan diri sebagai pembawa warisan dari jubah nasionalisme sekuler dan perumusannya oleh pemimpin nasionalis sekaligus Presiden pertama, Sukarno. Saingan utama dari sisi nasionalis sekuler adalah Golkar, partai yang berjaya pada era Orde Baru dan memiliki pengaruh kuat di masyarakat.

Setelah Partai Keadilan gagal memenuhi dua persen ambang batas elektoral pada debutnya di pemilu 1999 yang diperlukan untuk mengikuti pemilu 2004, Partai Keadilan dibentuk kembali sebagai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada bulan April 2002. Selama pemilihan legislatif 2004, PKS sukses merambah kursi parlemen pasca memenangkan 7,3 persen suara atau 45 kursi dari 550 kursi, perolehan suara yang menjadikan PKS menjadi partai terbesar ke-enam di parlemen saat itu (Permata, 2008:17). Di tahun yang sama, ketua PKS Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saat itu, kekuatan besar masih dipegang oleh PDI-Perjuangan, Golkar, dan PKB sebagai tiga partai politik teratas. Sementara di jajaran 10 besar, partai Demokrat sebagai partai baru dengan ideologi Nasionalis Pancasila langsung mendapat kursi legislatif dan bahkan berhak mengajukan koalisi untuk memasang kandidat Presiden dan Wakil Presiden (Ananta, Arifin, & Suyadinata, 2005:16).

Selain Partai Demokrat, PKS juga memiliki sumbangsih dalam menyalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden pertama yang dipilih

langsung oleh Rakyat di Indonesia. Saat itu, PKS bersama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) menyalonkan Amien Rais-Siswono sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Mereka berhadapan dengan empat calon lain yakni Hamzah Haz dan Agum Gumelar (dicalonkan oleh PPP), Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh PDI-P), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, PBB, dan PKPI), serta Wiranto dan Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golkar). Sebenarnya terdapat satu kandidat lain yang mendaftar, namun dinilai gagal memenuhi tes kesehatan, yakni pasangan Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim yang diusung oleh PKB. Saat itu, SBY berhasil memenangkan kontestasi pemilihan Presiden melalui dua putaran dengan mengalahkan Megawati-Hasyim di putaran kedua. Dalam posisinya di Parlemen, PKS menjadi koalisi Pemerintah yang mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meskipun menjadi pengusung lawan dari SBY yakni Amien Rais.

Perubahan mekanisme pada Pemilu 2004 yang mengharuskan Rakyat memilih DPR, DPD, DPRD, dan puncaknya Presiden kemudian dianggap sebagai sistem pemilihan yang paling rumit (Sherlock, 2004: 8). Saat itu, daerah pemilihan terdiri dari provinsi atau bagian dari provinsi yang terbagi menjadi beberapa daerah pemilihan. Dengan kisaran kursi per daerah pemilihan dari minimal 3 hingga maksimal 12, provinsi kecil dengan jumlah penduduk kurang dari 975.000 orang yang secara nominal dibutuhkan untuk 3 kursi masih akan dialokasikan 3 kursi (dengan seluruh

provinsi dianggap sebagai satu daerah pemilihan) serta provinsi yang lebih besar, terutama di Jawa dan Sumatera, akan dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan.

Kemudian pada pemilu 2009, beberapa partai baru bermunculan dan dengan cepat menjadi pesaing besar dalam skena politik di Indonesia seperti Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang dipelopori Wiranto dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) besutan Prabowo Subianto yang langsung meduduki 10 besar suara terbanyak pada Pemilu 2009. Adapun 18 dari total 34 partai politik yang lolos verifikasi merupakan partai baru atau setidaknya baru berganti nama. Sisanya adalah partai yang menang kursi di DPR pada periode 2004-2009, sehingga secara otomatis memiliki kualifikasi sebagai peserta Pemilu 2009.

Di tahun politik 2009, PKS merangkak naik di urutan ke-empat dengan perolehan 7,88 persen suara dan memperoleh 12 kursi legislatif tambahan dari Pemilu sebelumnya. PKS kemudian berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengukung SBY-Boediono sebagai kandidat Presiden dan Wakil Presiden dengan tiga partai Islam lain yang menjadi pengukung yakni PPP, PAN, dan PKB. Meskipun terdapat empat partai Islam dalam koalisi pengukung SBY-Boediono, isu mengenai agama mencuat sebagai serangan kepada SBY-Boediono. Istri dari Boediono dituding beragama Katolik lewat selebaran dengan tulisan "Apakah PKS Tidak Tahu, Istri Boediono Katolik" yang disebarakan media lokal Sumatera Utara, Monitor. Menanggapi hal tersebut, PKS melayangkan kontra argumen dengan mengatakan bahwa si pembuat kampanye hendaknya bertaubat dan meminta maaf (Pemfitnah Istri Boediono

Dihimbau Beristighfar. (2009, 21 Juni). Kompas.com). Kendati demikian, SBY-Boediono berhasil menang telak di Pemilihan Presiden 2009 dengan hanya melalui satu putaran pemilihan saja mengalahkan pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Pada Pemilu selanjutnya di tahun 2014, terjadi perubahan aturan mengenai ambang batas Parlemen lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang sebelumnya dibutuhkan 2,5 persen minimal suara naik menjadi 3,5 persen. Terdapat total 46 partai politik yang mendaftar pada Pemilu 2014, namun dalam kontestasinya hanya terdapat 12 partai yang beradu. PKS sebagai partai yang lolos pada Pemilu sebelumnya berhak melaju pada Pemilu 2014. Pada Pemilu kali ini, hanya dua partai yang tersingkir karena tidak memenuhi ambang batas, yakni PBB dan PKPI. Perolehan suara PKS pun menurun ke angka 6,77 persen suara. Kontestasi Pemilu saat itu dimenangkan oleh PDI-P dengan jumlah suara 18,95 persen diikuti Partai Golkar dengan 14,75 persen dan Partai Gerindra yang memperoleh 11,81 persen suara.

Di tahun politik ini, isu agama semakin memanas dengan adanya polarisasi antara dua pendukung kandidat Presiden-Wakil Presiden, yakni kubu Prabowo-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kubu Prabowo-Rajasa diusung koalisi Merah Putih beranggotakan Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PBB, dan PPP. Sementara kubu Jokowi-JK diusung oleh koalisi Indonesia Hebat yang beranggotakan PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura.

Dalam pemilihan presiden 2014, Prabowo menjalankan kampanye populis di mana dia menyalahkan masalah Indonesia pada elit yang tamak dan “agen asing” (etnis Cina) yang jahat. Dia juga mempertanyakan model demokrasi liberal dan berjanji untuk mengembalikan Indonesia ke UUD 1945, yang sangat mendukung kekuasaan eksekutif dan tidak memiliki tempat untuk pemilihan presiden langsung. Aliansinya dengan kelompok-kelompok Islam termasuk PKS dan kesediaannya untuk terlibat dalam kampanye kotor bertema sektarian merupakan hal baru dalam sejarah pemilihan presiden Indonesia (Aspinall & Mietzner, 2019: 112).

Kubu Prabowo, termasuk di dalamnya PKS mengeksploitasi kerentanan dan bersekutu dengan tokoh-tokoh Islam dan kelompok-kelompok Muslim garis keras. Kubu dan sekutunya menyebarkan pesan bahwa Jokowi bukan Muslim yang saleh dan bahwa politiknya terlalu sekuler untuk memerintah negara mayoritas Muslim yang banyak dijalankan melalui akun media sosial anonim dan majalah tabloid (Warburton, 2020: 27). Tak hanya Prabowo Aspinall & Mietzner (2019: 113) mengidentifikasi bahwa Jokowi turut berkontribusi secara tidak langsung pada polarisasi sebagai kandidat. Jokowi ikut menjadikan Islam sebagai bagian penting dari identitas politiknya. Kondisi ini bisa dilihat dari selama masa jabatan pertamanya, Jokowi berusaha melindungi dirinya dari serangan terhadap kredensial Muslim dengan membina hubungan yang lebih dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai imbasnya, perlindungan negara akhirnya mengalir ke NU dan PKB sebagai perpanjangan tangan politiknya.

Perpecahan dari polarisasi ini diperparah dengan kondisi politik Indonesia di tahun 2016-2017. Pada November dan Desember 2016, sejumlah kelompok Islam besar menuntut agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang merupakan etnis Tionghoa dan Kristen, dicopot dari jabatannya karena dituduh melakukan penistaan agama. Unjuk rasa ini yang kemudian dikenal sebagai Aksi Bela Islam 212, berhasil mempengaruhi opini publik sehingga Ahok kalah dalam pemilihan gubernur pada Mei 2017 dan diadili atas tuduhan penistaan agama (Arifianto, 2019:47).

Setelah aksi tersebut, aktivis yang terlibat membentuk Gerakan Alumni 212 dan kemudian bergerak untuk mendukung Prabowo, yang kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2019. PKS menjadi salah satu partai politik yang berperan besar dalam terciptanya gerakan tersebut dan paling konsisten sejak terbentuknya gerakan Aksi Bela Islam 212 jilid pertama (Pamungkas, Widyantoro, Wicaksono, 2020: 77).

Berbeda dengan pemilu 2014, di mana kelompok Islamis hanya merupakan bagian kecil dari koalisi ultranasionalis Prabowo, kelompok Islamis sekarang menjadi bagian integral dari kampanye Prabowo. Mereka memainkan peran penting dalam melakukan kampanye negatif terhadap Jokowi sambil memobilisasi pendukung untuk memilih Prabowo. Aktivis dalam Gerakan Alumni 212 juga mendukung aksi protes yang menyerukan agar Jokowi kalah dalam pemilu karena dipertanyakan rekam jejaknya dalam urusan ekonomi, sosial, dan agama. Aksi tersebut banyak di antaranya dilakukan di bawah bendera gerakan #2019GantiPresiden. Walaupun menyatakan

bahwa mereka tidak memiliki afiliasi dengan kampanye Prabowo, banyak peserta yang berasal dari partai politik dan kelompok Islam, seperti PKS, Majelis Dakwah Islam Indonesia, dan HTI (Arifianto, 2019: 48).

PA Alumni 212 juga bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo setelah bersekutu dengan partai Islam seperti PKS dan PAN. Meskipun tidak berhasil dalam Pemilihan, gerakan ini disinyalir memiliki andil besar pada kemenangan Prabowo di daerah pemilihan kunci, seperti Jawa Barat dan Sumatera Barat, serta di provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan yang menjadi lumbung kemenangan Jokowi pada pemilihan 2014 (Lanti & Dermawan, 2020:1).

Gerakan tersebut juga terlihat membantu mendongkrak suara yang didulang PKS di Pemilu 2019 (Pamungkas, Widyantoro, Wicaksono, 2020: 11). PKS mendapatkan suara tertinggi selama keterlibatannya di kancah politik Indonesia dengan perolehan 8,7 persen suara. Hasil tersebut menjadikan PKS sebagai salah satu partai yang mendapati peningkatan total suara signifikan di samping Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Perbandingan Suara Parpol 2014 dan 2019: Dari yang Melejit, Tersingkir, hingga yang Bertahan Jadi Juara. (2019, 21 Mei). Kompas.com).

Kekalahan Prabowo dan merapatnya Ia ke kubu Pemerintah mengakhiri loyalitas politik antara Prabowo beserta partai pendukungnya di Pemilu 2019 seperti PKS dan PAN. Kedua partai tersebut beserta organisasi Islam di luar sistem partai, kini

memandang Anies sebagai pemimpin baru oposisi dan sebagai kandidat Islamis pilihan untuk pemilihan presiden selanjutnya pada 2024 (Warburton, 2020:29).

2.2. Ideologi Partai Keadilan Sejahtera

PKS adalah partai Islam yang didirikan atas nilai-nilai dan ajaran Islam. Statuta PKS menetapkan bahwa dasar ideologisnya adalah Islam dan tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi Indonesia yang diridhai Allah (Statuta Dasar PKS, Pasal 2 ayat 5). Frasa tujuan politik PKS sebenarnya merupakan terjemahan sastra dari kearifan tradisional dari tujuan ideal politik Islam atau *Baldatun Thayyibatun wa rabbun ghafur*. Ungkapan ini dimasukkan dalam anggaran dasar PKS, yang menyatakan bahwa partai tersebut berlandaskan Islam sebagai ideologi politik yang berbunyi: “PKS adalah partai dakwah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang direstui demi Allah, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.” Selain itu juga ditambahkan bahwa PKS akan mencapai tujuan tersebut melalui upaya-upaya sebagai berikut: (1) Membebaskan Indonesia dari segala bentuk penindasan; (2) membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang Islami; (3) menyiapkan bangsa untuk mengatasi masalah dan tantangan masa depan; (4) membangun sistem kemasyarakatan dan pemerintahan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam; dan (5) membangun Indonesia baru yang adil, makmur, dan bermartabat. Oleh karena itu, PKS melihat konteks sejarahnya dengan menghadapi tantangan rezim otoriter dan diktator, serta melihat Islam muncul sebagai

solusi atas tantangan tersebut, dengan kata lain Islam dimaknai sebagai ideologi yang membebaskan dan mendemokratisasi (Permata, 2008: 126).

Partai ini secara fundamental berbeda dengan partai-partai Islam lainnya, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN, Partai Amanat Nasional) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam hal akar sejarahnya, ideologi, tujuan politik, dan jangkauan pemilih yang lebih luas. Perbedaan ini dilandaskan atas permutasi dari gerakan dakwah yang dianut PKS dengan mencontohkan Islam sebagai cara hidup total, yang mulai berkembang di kampus-kampus universitas di Indonesia pada tahun 1970-an. Pengaruh yang luas dari aliran dakwah ini memfasilitasi berkembangnya ide dan aktivisme Ikhwanul Muslimin yang mengadopsi nama *tarbiya* (pendidikan Islam) (Hasan, 2009: 1).

Meski mulanya condong kepada ideologi Islam secara penuh, PKS dalam perjalanan keikutsertaannya di panggung politik di Indonesia turut menambahkan konsep ideologi negara Pancasila. Hal ini mulai disuarakan pada tahun 2008, di mana gagasan Pancasila sebagai ideologi negara banyak dijadikan acuan dalam pernyataan publik dari kalangan elite PKS. Perubahan posisi partai terhadap ideologi negara menunjukkan bahwa PKS telah bergeser dari partai yang sebelumnya sama sekali tidak condong pada gagasan Pancasila menjadi partai yang secara formal menerima dan memasukkan gagasan tersebut pada ideologi resminya (Shihab & Nugroho, 2008:246).

Keputusan partai untuk menonjolkan nasionalisme dan ideologi negara memiliki arti penting, karena Pancasila telah dilihat sebagai simbol dari sifat majemuk masyarakat Indonesia. Pancasila pada era itu juga telah digunakan oleh beberapa kelompok sebagai titik kumpul untuk membela karakter sekuler Republik Indonesia (Allen, 2007: 112). Hal tersebut menjadikan PKS yang meskipun terkait erat dengan ajaran Islam, tetapi dalam kepemimpinannya, bagi PKS implementasi hukum syariah tidak harus diusulkan melalui kampanye atau seruan untuk menegakkan syariah dari pemerintah. Bagi mereka hal yang lebih diserukan adalah melakukan upaya untuk mengajak masyarakat umum tentang pentingnya syariah serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh pemahaman dan kesadaran (Machmudi, 2008:128). Kendati demikian, mayoritas kampanyenya didasarkan pada ajaran agama konservatif, seperti penentangan terhadap penjualan pornografi, dan hukuman keras bagi pelanggaran undang-undang narkoba (Noor, 2011: 8). Konservatismenya juga terlihat dari sikap ideologi populisme Islam yang direpresentasikan oleh PKS dalam keberhasilannya mendorong undang-undang anti-pornografi dan beberapa keputusan pemerintah daerah yang mengatur pakaian perempuan (Hadiz, 2014:10). Beberapa pendapat serta manuver yang dihasilkan oleh kader-kadernya membuktikan bahwa PKS sejatinya masih memiliki cita-cita lama yang menginginkan tegaknya syariat Islam, kendati beberapa kader juga membantah klaim tersebut. (Gerald, 2019:155).

Lebih lanjut mengenai ideologi partai politik di Indonesia, Aspinall, Muhtadi, Fossati, dan Warburton (2018) melakukan survei untuk mengkaji arah ideologi partai politik di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak partai Islam, partai politik Islam di Indonesia membedakan diri melalui indikator orientasi Islam atau pendekatan pluralis. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan partai yang paling inklusif. PDI-P cenderung mendapatkan dukungan dari minoritas agama dan kelompok Islam abangan. Di ujung spektrum ideologis terdapat partai-partai Islam konservatif seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Konstituennya biasanya merupakan kelompok yang puritan dan berasal dari penduduk kelas menengah kota. Partai Islam lain yang signifikan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di tengah spektrum. Indikasinya karena PKB terkait dengan Nahdlatul Ulama (NU), yang memiliki orientasi tradisional. Prinsip ini membuat PKB lebih toleran terhadap keragaman agama dan budaya. Sebagian besar partai politik kontemporer lainnya memiliki dukungan yang beragam secara ideologis, termasuk Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

Terlepas dari pentingnya perbedaan Islam-pluralis, kompetisi elektoral yang berlangsung berjalan bebas dari konflik berbasis ideologis selama sebagian besar periode pemilu di Indonesia. Partai-partai bersedia masuk ke dalam koalisi pemerintahan dengan semua jenis partai lain, terlepas dari orientasi ideologis mereka dalam mengejar kemenangan elektoral (Warburton, 2020: 32).

2.3 Silang Pendapat Partai Keadilan Sejahtera

Dalam sejarahnya, PKS bisa dibilang sukses dalam membangun sebuah partai Islam, namun hal tersebut sekaligus memicu silang pendapat atau kontroversi dalam politik Indonesia. Di satu sisi dalam pandangan pro-PKS, keberhasilan ini membuktikan keseriusan PKS untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan menyanggah tuduhan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia pada akhirnya akan menolak PKS. Namun bagi kubu kontra, keberhasilan itu menimbulkan kecurigaan lain tentang motif sebenarnya dari PKS. Kontroversi tersebut bersumber dari persepsi pengamat dan publik yang menilai bahwa ideologi Islam PKS mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan demokrasi dan partisipasinya dalam demokrasi hanyalah dalih untuk tujuan lain yakni mendirikan sistem politik Islam (Permata, 2008:6).

Kontroversi ini menurut Machmudi (2008:69) berangkat dari organisasi yang menjadi cikal bakal PKS, yakni Jemaah Tarbiyah. Berlandaskan pola Islamisasi individu, Jemaah Tarbiyah telah melakukan upaya keras untuk menumbuhkan dan mendidik komitmen individu terhadap Islam. Islamisasi model Tarbiyah bertujuan untuk mengajak umat Muslim untuk memeluk Islam secara utuh sebagai sistem yang meliputi segala hal (*shamil*). Islam didoktrin menjadi satu-satunya pedoman hidup (*minhaj al-hayah*) yang menyediakan semua kebutuhan spiritual dan duniawi manusia selayaknya hukum, peradaban, budaya, sistem politik dan pemerintahan. Singkatnya, umat Islam yang menganut konsep tarbiyah meyakini bahwa tidak ada satu pun perkara yang tidak berada di bawah aturan Islam.

Dalam kasus Indonesia, rezim dengan cepat menangani gerakan-gerakan yang bertujuan untuk negara Islam dengan keras seperti tujuan Jamaah Tarbiyah. Pendekatan politik yang menitikberatkan pada perjuangan melalui pembentukan partai politik yang legal, meskipun tidak lepas dari campur tangan pemerintah, setidaknya memberikan kemungkinan untuk mencapai tujuannya. Pendekatan partai politik ini memberi kepercayaan bahwa Islam adalah agama praktis, menawarkan Jamaah Tarbiyah dan Islamisasi di Indonesia sebagai pedoman dalam urusan politik, sosial, ekonomi dan internasional (Mahmudi, 2008: 69).

Meski dirundung kontroversi pada masa-masa awal keikutsertaannya, seiring kiprah politik dari tahun ke tahun, PKS mengklaim telah memimpin tren adaptasi pasca-Islam terhadap demokrasi Indonesia. PKS beralasan partainya telah cukup mengakui fondasi Indonesia yang majemuk secara agama dan sering membentuk koalisi pragmatis dengan partai-partai non-Islam sebagai dalih pasca-Islam (Miichi, 2020: 593).

Pasca-Islamisme, menurut Bayat (1996:46), merujuk pada kondisi dan gagasan untuk mengkonseptualisasikan serta mengembangkan strategi pemikiran dan transendensi Islam dalam konteks sosial, politik, dan intelektual. Konsep ini muncul sebagai alternatif terhadap Islamisme yang lebih dogmatis sebelumnya. Post-Islamisme dapat dianggap sebagai pendekatan hibrida karena berusaha menggabungkan Islam dengan demokrasi dan modernitas.

Kendati demikian, pernyataan PKS sebagai partai pasca-Islam justru bertolak belakang dengan agenda yang dibawa. Ideologi dan praktik partai nyatanya banyak yang tidak sesuai dengan asumsi pasca-Islam sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Bayat. Hal ini terlihat dari sikap PKS yang mendukung UU Pornografi yang justru menguatkan sisi konservatisme ketimbang demokrasi dan modernitas yang sesuai dengan ideologi pasca-Islamisme (Allen, 2007:113). Selain kontroversi mengenai UU Pornografi, teranyar PKS dalam praktiknya secara gender justru mendukung pandangan keluarga patriarkal, yang dilegitimasi sebagai moral dan kewajiban agama (Miichi, 2020: 591). PKS mendukung penguatan kontrol atas moralitas seksual seperti perzinahan dan pelarangan LGBT+ dengan menentang RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Kritik awal terhadap RUU tersebut datang dari sebuah LSM bernama Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA Indonesia), yang dikenal sebagai advokat tegas untuk patriarki heteronormatif berdasarkan ideologi Islam. AILA menyatakan keprihatinan tentang gangguan moral dan mendesak kontrol seksualitas yang lebih ketat, terutama memperingatkan penyebaran zina dan penerimaan individu LGBT+. AILA membingkai RUU TPKS sebagai produk feminisme Barat yang mempromosikan zina dan penerimaan individu LGBT. Pandangan AILA lantas diamini oleh PKS, satu-satunya partai di legislatif yang menyetujui pendapat tersebut. Pandangan-pandangan ini diungkapkan dalam wacana Islamis, yang tidak selaras dengan citra PKS pasca-Islamis (Miichi, 2020: 604).

Beragam kontroversi lain yang cukup mengemuka dari PKS antara lain penolakan Undang-Undang Ibukota Negara (UU IKN) pada 2021, kasus korupsi impor daging sapi oleh presiden partai Luthfi Hasan Ishaq di 2013, dorongan UU Pornografi, hingga dukungan agar Suharto dijadikan sebagai Pahlawan Nasional pada 2008. Sebagai buntut dari rangkaian kontroversi yang ada, beberapa golongan kemudian menyerukan pembubaran PKS setidaknya dua kali yakni pada 2013 dan 2022. Pada 2013, Mashadi selaku pendiri PKS meminta PKS untuk dibubarkan setelah kasus korupsi daging sapi yang menurutnya menurunkan martabat serta citra partai (Pendiri Usulkan PKS Dibubarkan. (2013, 3 Februari). BeritaSatu). Sementara pada 2022, publik meramaikan tagar “Bubarkan PKS” hingga menjadi *trending* sebagai imbas dari penolakan UU IKN dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (Publik Mendadak Minta PKS Dibubarkan, Ada Apa Ini?. (2022, 20 Januari). Pikiran Rakyat).

Selain kontroversi eksternal, selama bertahun-tahun, PKS telah mengalami persaingan internal yang berkepanjangan, khususnya antara kubu-kubu yang dapat diidentifikasi sebagai pragmatis di satu sisi dan melawan idealis di sisi lain. Secara umum, kedua fraksi tersebut dikenal sebagai Faksi Keadilan dan Faksi Kesejahteraan. Fraksi keadilan terdiri dari revivalis, idealis dan harakah. Fraksi ini umumnya dihuni oleh para lansia konservatif, seperti Salim Segaf al-Jufri dan M. Sohibul Iman, ketua PKS saat ini. Sedangkan kubu kesejahteraan yang diisi tokoh pragmatis seperti Anis Matta, Fahri Hamzah dan Mahfudz Siddiq adalah kubu modernis, realis, dan hizb (Muhtadi, 2012: 219).

Dalam beberapa kesempatan, kedua fraksi itu kerap terlibat adu mulut sengit, seperti saat Musyawarah Nasional (Mukernas) 2008 di Bali. Fraksi Keadilan menilai konvensi tersebut terlalu boros dan pemilihan tempat yaitu Bali tidak mencerminkan citra PKS sebagai partai Islam karena tempat tersebut terkenal dengan pariwisata sehingga marak praktik prostitusi. Gesekan antara kedua fraksi tersebut kemudian memicu munculnya Foruk Kader Peduli (FKP) yang diprakarsai oleh Tizar Zain. Mereka yang berkumpul dalam pertemuan dan pengajian FKP, terutama di Masjid al-Hikmah, Jakarta Selatan, mengungkapkan kekecewaannya karena PKS dipandang semakin pragmatis dan menjauh dari nilai-nilai intinya. Kekecewaan itu juga karena gaya hidup yang dihadirkan oleh Hilmi Aminuddin (pemimpin Majelis Syura saat itu) yang selalu bepergian dengan mobil mewah seperti Toyota Alphard atau Anis Mata yang melakukan hedonisme dengan memakai jam tangan Rolex dan juga poligami (Munandar 2011: 82).

Terlepas dari gesekan-gesekan, faksionalisme di dalam PKS sebelumnya cukup terjaga dan tidak meluas ke publik karena manajemen konfliknya yang baik, di mana semua masalah diselesaikan melalui mekanisme *halaqah* (Noor, 2012:258). Namun, di bawah kepemimpinan Muhammad Sohbul Iman (2015-2020), faksionalisme tersebut meningkat sedemikian rupa. Hal tersebut ditandai dengan dideklarasikannya organisasi bernama Garbi pada Oktober 2018 oleh sejumlah anggota PKS, termasuk mantan presidennya, Anis Matta. Salah satu perbedaan utama dengan divisi internal sebelumnya adalah para penggagas Garbi menolak untuk diam dan tetap aktif dengan

melakukan wawancara dengan media atau mengumumkan deklarasi cabang-cabangnya di seluruh Indonesia (Priohutomo; Kamarudin; Hidayat: 2019: 33).

PKS sebagai partai politik yang sudah mewarnai wajah politik Indonesia sejak awal masa Reformasi kini telah menjelma menjadi partai yang memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan di Indonesia. Konsisten membawa nilai Islam sejak awal terbentuk, PKS memiliki massa pendukung dari kalangan Islam konservatif yang cukup luas dengan adanya agenda-agenda gerakan politis yang berkaitan dengan ideologi Islamis. Konteks ini dapat berdampak bagi demokrasi serta instrumen kebijakan yang didorong atas nama semangat umat Islam dan kemenangan kaum Muslim. Kontroversi mengenai dorongan akan aturan-aturan hukum dan kebijakan yang dilandaskan atas moral serta nilai keislaman yang menjadi kubu mayoritas di Indonesia membuat PKS sering kali bergesekan dengan kelompok-kelompok pluralis dan minoritas seperti Individu atau kelompok keturunan Cina, Kristen atau non-Islam lainnya, hingga LGBT+.